

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pada pembangunan ekonomi di daerah. Tujuan pembangunan itu sendiri tidak jauh berbeda dengan tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi, proses pembangunan di daerah lebih spesifik (Tambunan, 2001)

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan

suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010).

Menurut Todaro dan Smith (2006), bahwa pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa kemiskinan menjadi salah satu masalah yang harus diatasi dalam konteks pembangunan ekonomi sesuai pandangan ekonomi baru. Keberhasilan suatu perekonomian tidak lagi hanya diukur melalui peningkatan PDB, melainkan juga kemampuan suatu negara dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian “Perkataan Khusus” memiliki cakupan yang luas, antara lain karena

dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh dan Irian Jaya).

Pengaturan mengenai otonomi khusus bagi daerah tertentu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, mencakup segala segi, sehingga setiap daerah dapat menuntut suatu kekhususan, semata-mata berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu kriteria umum yang ditetapkan dalam undang-undang. Apalagi jika kekhususan itu mengandung muatan privelege tertentu yang tidak dimiliki daerah lain. Hal ini disebabkan aspirasi masyarakat di daerah itu beragam, karena potensi, situasi dan keadaan di setiap daerah tidak sama atau satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pandangan yang menggeneralisasikan dan menyamaratakan kemampuan potensial, situasi dan keadaan terhadap setiap daerah merupakan hal yang salah kaprah.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh menurut PDRB atas dasar harga konstan jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara nasional yakni 1,65%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara Nasional pada kisaran 5-6%, Adapun tingkat pendapatan perkapita masyarakat Aceh berkisar Rp 26 juta/kapita yang berada dibawah rata-rata nasional Rp 42 juta per kapita.

Kelemahan perekonomian Aceh dapat dipetakan pada tiga kelemahan utama yaitu: Pertama, tidak memiliki industri hilir yang mengolah bahan-baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Aceh memiliki sumber daya alam mineral minyak bumi, gas, batubara, batu mulia, emas, dan kekayaan dibidang perkebunan kelapa sawit, karet, pinang, kelapa, nilam, serta hasil laut dan budidaya ikan air tawar. Namun sayangnya, tidak dibarengi dengan pembangunan

kawasan industri seperti kawasan industri Belawan, Sumatra Utara. Kedua, kurangnya sinkronisasi dalam pembangunan antara provinsi dan kabupaten serta antara kabupaten dengan kabupaten lainnya. Hal ini terlihat dari pembangunan infrastruktur di Aceh yang belum terkoordinir antar provinsi dan kabupaten. Dana alokasi khusus dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 6-7 triliun setiap tahunnya, tidak fokus pada penguatan satu per satu infrastruktur di Aceh, misalnya pembangunan pelabuhan yang merata di tiap-tiap kabupaten yang semestinya digunakan untuk membangun pelabuhan peti kemas terbesar di Sumatera dengan dana patungan. Ketiga, rendahnya investasi karena citra sebagai daerah bekas konflik dan daerah rawan bencana belum mampu dipulihkan. Investor merupakan orang yang rasional dalam melaksanakan investasinya. Dengan masa lalu Aceh sebagai daerah konflik dan bencana, akan membuat para investor berpikir seribu satu kali untuk menanamkan uangnya di Aceh. Hal ini perlu kerja sama semua pihak untuk menyakinkan pihak investor tentang keamanan Aceh. Selain kelemahan tersebut, Aceh merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam, serta memiliki letak geografis di gerbang Selat Malaka yang merupakan lalu lintas perdagangan tersibuk di dunia. Kekuatan inilah yang harus dimaksimalkan dengan baik.

Untuk mengetahui potensi pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh diperlukan suatu metode yang berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada.

Dalam menggunakan pendekatan model basis ekonomi pada umumnya didasarkan atas nilai tambah maupun lapangan kerja. Namun menggunakan data pendapatan (nilai tambah) adalah lebih tepat dibandingkan menggunakan data lapangan kerja. Hal ini dikarenakan lapangan kerja memiliki bobot yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi neto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh disumbang oleh 17 (Tujuh Belas) sektor yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintah; pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya.

Dibawah ini table peranan setiap sektor ekonomi dalam perekonomian Provinsi Aceh selama 2010 s.d. 2016.

Tabel I.1
Peranan Setiap Sektor Ekonomi Dalam Perekonomian Provinsi Aceh
Tahun 2010 s.d. 2016 (Persentase)

No.	Sektor Ekonomi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	25.2	25.28	25.42	25.93	26.16	27.65	27.81
2	Pertambangan Dan Penggalian	15.35	14.56	13.67	12.64	11.28	8.28	6.95
3	Industri Pengolahan	8.84	8.64	8.52	7.91	7.19	5.76	5.25
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
6	Konstruksi	8.08	8.29	8.51	8.68	9.06	9.57	10.45
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	13.65	13.94	14.26	14.68	15.06	15.76	15.73
8	Transportasi Dan Pergudangan	7.27	7.39	7.50	7.62	7.70	7.93	7.62
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0.89	0.94	0.97	1.01	1.06	1.14	1.19
10	Informasi Dan Komunikasi	3.22	3.25	3.36	3.44	3.52	3.62	3.61
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	1.45	1.52	1.49	1.54	1.54	1.60	1.70
12	Real Estate	3.1	3.13	3.16	3.25	3.44	3.71	3.87
13	Jasa Perusahaan	0.54	0.54	0.54	0.55	0.59	0.61	0.63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	7.08	7.17	7.06	7.09	7.48	8.05	8.55
15	Jasa Pendidikan	1.97	1.94	1.94	1.97	2.06	2.21	2.35
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	2.12	2.15	2.31	2.40	2.50	2.67	2.78
17	Jasa Lainnya	1.1	1.12	1.14	1.16	1.21	1.29	1.33
	Total PDRB ADHK (2000)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Aceh Tahun 2010-2016 (diolah)

Peranan setiap sektor ekonomi dalam perekonomian dapat diketahui dari angka distribusi persentase Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2000 seperti yang dapat dilihat melalui Tabel I.1. Berdasarkan Tabel I.1 tersebut tampak bahwa sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas menjadi 2 sektor dengan peranan paling rendah dalam perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2010 yaitu

sebesar 0.02 persen dan 0.12 persen. Sementara itu sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan adalah sektor ekonomi yang paling besar sumbangannya dalam perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2010. Sekitar 25.2 % perekonomian Provinsi Aceh merupakan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan. Rendahnya peranan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan besarnya peranan sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan dalam perekonomian Provinsi Aceh tidak hanya terjadi pada 2010 tetapi juga beberapa tahun setelahnya. Hal ini memperlihatkan bahwa provinsi Aceh masih mempunyai cirri-ciri sebagai Provinsi berkembang. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan menganalisi potensi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh pada tahun 2010-2016.

1.2 Rumusan Masalah

1. Sektor basis dan nonbasis apa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Aceh?
2. Sektor-sektor ekonomi mana yang potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sektor basis ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Aceh.
2. Menganalisis sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Tambahkan informasi dan bahan kajian tentang gambaran/informasi tentang potensi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh sehingga pemerintah daerah dapat lebih mengembangkan potensi daerahnya.
2. Dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan Provinsi Aceh dalam rangka program pembangunan selanjutnya dan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ada.